
Analisis Normatif dan Positif Perlakuan Akuntansi Aset Tetap: Studi Komparatif UNVR dan INDF

Suci Rahmawati^{1*}, Dini Nuraeni¹, Wulan Permata Sari¹

¹Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia
63251558@bsi.ac.id*

Article History:

Received : 26-06-2026

Accepted : 04-07-2026

Keywords: Teori Akuntansi Normatif; Teori Akuntansi Positif; Aset Tetap; Studi Komparatif

Abstract: Perlakuan akuntansi aset tetap merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan manufaktur karena memengaruhi nilai aset, beban penyusutan, dan laba yang dilaporkan. Meskipun PSAK 16 telah mengatur pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap, standar tersebut masih memberikan ruang bagi manajemen untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menetapkan estimasi umur manfaat dan kebijakan akuntansi lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap pada PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (INDF) berdasarkan perspektif Teori Akuntansi Normatif dan Positive Accounting Theory. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi komparatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan audit tahun buku 2025, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), serta literatur yang relevan. Analisis dilakukan melalui evaluasi kepatuhan terhadap PSAK 16 dan interpretasi kebijakan akuntansi berdasarkan perspektif Positive Accounting Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua perusahaan telah menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan ketentuan PSAK 16, ditandai dengan penggunaan cost model dan metode penyusutan garis lurus. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penetapan estimasi umur manfaat aset tetap yang mencerminkan adanya ruang diskresi manajerial dalam penerapan standar akuntansi. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan perspektif normatif dan positif dalam mengevaluasi perlakuan akuntansi aset tetap, sehingga tidak hanya menilai tingkat kepatuhan terhadap standar,

tetapi juga memberikan pemahaman mengenai kemungkinan faktor ekonomi yang memengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan media utama dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Salah satu unsur yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kualitas laporan keuangan adalah aset tetap, terutama pada perusahaan manufaktur yang bergantung pada investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, bangunan, mesin, dan peralatan produksi. Besarnya nilai aset tetap menyebabkan kebijakan akuntansi yang diterapkan terhadap aset tersebut berpengaruh langsung terhadap nilai aset, beban penyusutan, laba perusahaan, hingga berbagai rasio keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh investor, kreditor, maupun regulator (Yolina et al., 2026; Ahmad et al., 2026).

Di Indonesia, perlakuan akuntansi aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 yang mengatur aspek pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian pengakuan, serta pengungkapan aset tetap. PSAK 16 memberikan fleksibilitas kepada entitas dalam memilih model pengukuran setelah pengakuan awal, yaitu *cost model* atau *revaluation model*, serta memberikan ruang pertimbangan profesional (*professional judgment*) kepada manajemen dalam menentukan estimasi umur manfaat dan metode penyusutan. Fleksibilitas tersebut bertujuan agar informasi yang disajikan mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara wajar, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya diskresi manajerial dalam penyusunan laporan keuangan (Yuliana et al., 2025; Ahmad et al., 2026).

Dalam perspektif Teori Akuntansi Normatif, kebijakan akuntansi dipandang sebagai seperangkat aturan yang seharusnya diterapkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Sebaliknya, *Positive Accounting Theory* menjelaskan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap standar, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai insentif ekonomi yang dimiliki manajemen. *Bonus Plan Hypothesis*, *Political Cost Hypothesis*, dan *Debt Covenant Hypothesis* menjelaskan bahwa manajemen dapat memilih alternatif kebijakan akuntansi tertentu untuk memaksimalkan kepentingan ekonominya selama masih berada dalam koridor standar akuntansi yang berlaku (Scott, 2022; Watts & Zimmerman, 1978).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai aset tetap masih berfokus pada evaluasi kepatuhan penerapan PSAK 16 pada suatu entitas tertentu. Kumambow et al. (2022) menemukan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada PT Sinar Galesong Prima secara umum telah sesuai dengan PSAK 16 meskipun masih terdapat kelemahan dalam penyajian akumulasi penyusutan. Penelitian Yuliana et al. (2025) melalui pendekatan *systematic literature review* juga menyimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia telah

menerapkan PSAK 16 dengan baik pada aspek pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan aset tetap. Penelitian terbaru oleh Yolina et al. (2026) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 16 pada PT Filtrona Manufacturing Indonesia telah memenuhi ketentuan standar, sedangkan Ahmad et al. (2026) memperoleh hasil serupa pada PT Perkebunan Nusantara IV setelah implementasi PSAK 216.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi tanpa mengkaji alasan ekonomi yang melatarbelakangi pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen. Kajian yang mengintegrasikan perspektif Teori Akuntansi Normatif dengan Positive Accounting Theory dalam menganalisis perlakuan akuntansi aset tetap pada perusahaan publik berskala besar masih relatif terbatas. Padahal, ruang diskresi yang diberikan PSAK 16 memungkinkan perusahaan yang sama-sama patuh terhadap standar menghasilkan kebijakan akuntansi yang berbeda sesuai dengan karakteristik operasional maupun kepentingan ekonominya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang masih perlu dieksplorasi lebih lanjut.

PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (INDF) merupakan dua perusahaan manufaktur terbesar di Indonesia yang memiliki investasi aset tetap dalam jumlah material dan beroperasi pada sektor industri yang relatif sebanding. Meskipun keduanya menerapkan PSAK 16 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, terdapat kemungkinan adanya perbedaan kebijakan dalam penentuan estimasi umur manfaat, metode penyusutan, maupun model pengukuran aset tetap yang dapat dijelaskan melalui perspektif *Positive Accounting Theory*. Perbedaan tersebut menarik untuk dikaji karena tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga menggambarkan bagaimana manajemen menggunakan ruang diskresi yang tersedia dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap pada PT Unilever Indonesia Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berdasarkan dua perspektif, yaitu Teori Akuntansi Normatif dan Positive Accounting Theory. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi kedua perspektif tersebut dalam satu kerangka analisis sehingga tidak hanya mengevaluasi kepatuhan perusahaan terhadap PSAK 16, tetapi juga menginterpretasikan kemungkinan motivasi ekonomi di balik pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajemen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur teori akuntansi serta menjadi referensi bagi investor, akademisi, dan praktisi dalam memahami hubungan antara kepatuhan terhadap standar akuntansi dan perilaku oportunistik manajemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi komparatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif-deskriptif dipilih karena tujuan utama penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis secara statistik dengan data sampel

besar, melainkan untuk menggambarkan dan menafsirkan kebijakan akuntansi aset tetap dua entitas spesifik secara mendalam (*in-depth*), kemudian membandingkannya melalui dua lensa teoretis yang berbeda yaitu normatif dan positif. Desain komparatif dipilih karena kedua objek UNVR dan INDF berada dalam industri yang relatif serupa (*consumer goods*/manufaktur konsumsi), sehingga perbedaan kebijakan akuntansi yang ditemukan dapat lebih mudah ditelusuri sumbernya: apakah perbedaan tersebut murni disebabkan oleh perbedaan karakteristik fisik aset, ataukah ada faktor lain seperti skala perusahaan dan struktur insentif manajemen.

Objek penelitian adalah akun aset tetap (*Property, Plant, and Equipment*) yang tercatat dalam laporan posisi keuangan, beserta catatan atas laporan keuangan (CALK) terkait kebijakan akuntansi aset tetap, pada dua emiten: PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (INDF). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan (*annual report*) audited tahun buku 2025 yang dipublikasikan secara resmi melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI/IDX) dan situs resmi masing-masing perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi (penelusuran dan pencatatan data kuantitatif maupun kualitatif dari laporan keuangan audited) dan studi pustaka. Analisis data dilakukan melalui tahap tabulasi data, analisis kepatuhan normatif terhadap PSAK 16, analisis perilaku positif (*Bonus Plan Hypothesis* dan *Political Cost Hypothesis*), serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan keuangan *audited* tahun 2025, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) melaporkan nilai tercatat neto aset tetap sebesar Rp 7,14 triliun, dari total aset sebesar Rp 20,01 triliun. Dengan demikian, intensitas aset tetap (*fixed asset intensity*) UNVR berada pada kisaran 35,7% dari total aset. Dari sisi kebijakan akuntansi, UNVR secara konsisten menerapkan *Cost Model* untuk seluruh kelompok aset tetapnya, dengan Metode Garis Lurus (*Straight-Line Method*) sebagai basis alokasi beban depresiasi. Taksiran umur ekonomis untuk kelompok bangunan dan prasarana ditetapkan pada rata-rata 20 tahun. Dibandingkan dengan praktik umum industri manufaktur di Indonesia yang sering menetapkan umur bangunan pada kisaran 20–30 tahun, taksiran 20 tahun milik UNVR tergolong konservatif dan relatif sempit (ketat).

Di sisi lain, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (INDF) melaporkan nilai tercatat neto aset tetap sebesar Rp 48,06 triliun dari total aset Rp 209,24 triliun. Secara nominal, angka aset tetap INDF lebih dari enam kali lipat nilai aset tetap UNVR, mencerminkan skala operasi INDF yang jauh lebih besar. Meskipun nominal aset tetap INDF jauh lebih besar, intensitas aset tetapnya (sekitar 23% dari total aset) justru lebih rendah dibandingkan UNVR (35,7%). Sama seperti UNVR, INDF juga menerapkan *Cost Model* dan Metode Garis Lurus. Namun, perbedaan paling mencolok terletak pada rentang taksiran umur ekonomis untuk kelompok bangunan dan mesin, yang ditetapkan pada kisaran 2 hingga 30 tahun. Rentang ini sangat lebar 15 kali lipat antara batas bawah dan batas atas.

Tabel 1. Perbandingan Indikator Akuntansi Aset Tetap UNVR dan INDF 2025

Indikator	UNVR	INDF
Nilai Neto Aset Tetap	Rp 7,14 triliun	Rp 48,06 triliun
Total Aset	Rp 20,01 triliun	Rp 209,24 triliun
Intensitas Aset Tetap	≈ 35,7%	≈ 23,0%
Model Pengukuran	Cost Model	Cost Model
Metode Depresiasi	Garis Lurus	Garis Lurus
Estimasi Umur Bangunan/Mesin	Rata-rata 20 tahun (ketat)	2-30 tahun (sangat lebar)
Lebar Rentang Estimasi	Relatif sempit (single point)	28 tahun (rasio 1:15)

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Audited UNVR dan INDF Tahun Buku 2025

Analisis Perspektif Teori Normatif

Secara formal, perlakuan aset tetap pada UNVR dan INDF telah memenuhi seluruh kriteria kepatuhan terhadap PSAK 16. Keduanya kompak menerapkan *Cost Model* sebagai basis pengukuran lanjutan serta menggunakan Metode Garis Lurus untuk alokasi penyusutan periodik. Pengungkapan estimasi masa manfaat juga telah disajikan secara transparan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) kedua perusahaan. Keputusan memprioritaskan *Cost Model* didasarkan pada efisiensi biaya penilaian (*appraisal costs*), stabilitas ekuitas dan pajak, serta objektivitas data biaya perolehan yang dapat diverifikasi secara mutlak melalui bukti transaksi riil. Penggunaan *Cost Model* oleh kedua perusahaan juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan hasil penelitian Ahmad et al. (2026), yang menemukan bahwa perusahaan manufaktur lebih memilih model biaya karena dianggap lebih objektif, mudah diverifikasi, serta mampu menjaga stabilitas nilai aset dibandingkan model revaluasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan *Cost Model* tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi biaya dan kemudahan implementasi dalam praktik bisnis.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Kumambow et al. (2022) yang menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada perusahaan yang diteliti telah memenuhi ketentuan PSAK 16, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyusutan aset tetap. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Yuliana et al. (2025) yang melalui kajian literatur menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia telah menerapkan PSAK 16 sesuai dengan ketentuan standar. Dengan demikian, kepatuhan normatif terhadap PSAK 16 merupakan praktik yang telah banyak diterapkan oleh perusahaan besar, termasuk UNVR dan INDF.

Analisis Perspektif Teori Positif

Melalui lensa *Political Cost Hypothesis*, INDF menghadapi eksposur biaya politik yang sangat tinggi karena menguasai industri pangan nasional dengan total aset Rp 209,24 triliun. Jika manajemen INDF menerapkan metode revaluasi, nilai buku aset

tetap mereka akan melambung tinggi, memicu risiko pengawasan regulasi monopoli dari pemerintah dan mengundang target pengenaan tarif pajak properti yang jauh lebih tinggi. Maka, manajer INDF memilih *Cost Model* untuk menjaga profil kekayaan fisik perusahaan tetap rendah (*low profile*).

Interpretasi tersebut sejalan dengan *Positive Accounting Theory* yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1978), yaitu bahwa perusahaan besar cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat meminimalkan biaya politik (*political costs*). Scott (2022) juga menjelaskan bahwa pemilihan estimasi akuntansi merupakan salah satu bentuk diskresi manajerial yang masih diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun UNVR dan INDF sama-sama menerapkan PSAK 16, perbedaan estimasi umur manfaat aset tetap dapat dipandang sebagai konsekuensi dari penggunaan professional judgment oleh manajemen.

Melalui lensa *Bonus Plan Hypothesis*, kebijakan manajemen INDF yang memperpanjang taksiran umur bangunan dan sarana pabrik hingga batas maksimal 30 tahun berkaitan erat dengan pengamanan skema bonus internal. Semakin panjang umur ekonomis yang ditaksir oleh manajemen, maka beban penyusutan periodik menjadi semakin kecil. Dampaknya, angka laba bersih operasional dapat disajikan dalam performa yang tinggi dan stabil, sehingga mengamankan pencapaian target kinerja manajerial dan melancarkan pencairan alokasi bonus akhir tahun. Sebaliknya, UNVR memilih rentang umur ekonomis yang sempit dan lebih pendek (rata-rata 20 tahun) untuk mencerminkan karakteristik operasional ritel cepat yang sarat akan risiko keusangan teknologi dan kebutuhan pembaruan fasilitas (*upgrading*) yang konstan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK 16 tidak selalu menghasilkan kebijakan akuntansi yang identik antarperusahaan. Meskipun UNVR dan INDF sama-sama memenuhi ketentuan standar, terdapat perbedaan dalam penggunaan estimasi umur manfaat aset tetap yang menunjukkan adanya ruang diskresi manajerial. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan normatif dan *Positive Accounting Theory* bersifat saling melengkapi dalam menjelaskan praktik akuntansi perusahaan, yakni kepatuhan terhadap standar dapat berjalan bersamaan dengan pertimbangan ekonomi yang memengaruhi pemilihan kebijakan akuntansi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis komparatif perlakuan akuntansi aset tetap pada PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (INDF) tahun buku 2025, dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan telah patuh secara penuh terhadap ketentuan normatif PSAK 16. Baik UNVR maupun INDF secara konsisten menerapkan *Cost Model* sebagai basis pengukuran lanjutan serta Metode Garis Lurus dalam mengalokasikan beban penyusutan periodik. Namun, dari perspektif Teori Akuntansi Positif, terdapat perbedaan motivasi manajerial yang signifikan dalam penetapan estimasi umur ekonomis aset tetap. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memilih rentang estimasi umur manfaat yang sangat lebar (2

hingga 30 tahun) yang mengindikasikan adanya upaya minimalisasi biaya politik (*Political Cost Hypothesis*) mengingat skala aset perusahaan yang masif, sekaligus pengamanan skema bonus manajerial (*Bonus Plan Hypothesis*) melalui minimalisasi beban depresiasi untuk menjaga stabilitas laba bersih. Sebaliknya, PT Unilever Indonesia Tbk menerapkan estimasi yang lebih ketat dan konservatif (rata-rata 20 tahun) demi mencerminkan realitas operasional industri ritel yang dinamis dan berisiko tinggi terhadap keusangan teknologi.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan hanya terbatas pada data sekunder yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan (*annual report*) tanpa adanya konfirmasi langsung melalui wawancara dengan pihak manajemen atau komite audit perusahaan terkait. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mendalami topik ini, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menggunakan metode campuran (*mixed-methods*) agar dapat menggali motivasi internal manajemen secara lebih komprehensif. Selain itu, bagi para investor dan analis keuangan, disarankan untuk tidak hanya terpaku pada angka laba bersih yang disajikan di atas kertas, melainkan harus lebih cermat dalam menelaah Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), khususnya terkait subjektivitas kebijakan estimasi akuntansi yang diterapkan oleh manajemen emiten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. H., Syarvina, W., & Nasution, Y. S. J. (2026). *Analysis of the Implementation of Fixed Asset Accounting Based on Financial Accounting Standards Statement PSAK 216 at PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV*. JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi), 10(1), 178-185. <https://doi.org/10.36555/jasa.v10i1.3024>
- Averio, T. (2023). *Accounting conservatism: The effect of firm performance, positive accounting theory, and litigation risk*. Ekonis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 25(2). <http://dx.doi.org/10.30811/ekonis.v25i2.4249>
- Godfrey, J., Hodgson, A., Tarca, A., Hamilton, J., & Holmes, S. (2021). *Accounting theory* (9th ed.). John Wiley & Sons.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK): PSAK 16 Aset Tetap*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (n.d.). *Pengesahan amendemen PSAK 16: Aset tetap tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kumambow, N. K., Moroki, F., & Lambut, A. (2022). *Analisis Perlakuan Aset Tetap pada PT Sinar Galesong Prima Cabang Boulevard*. Jurnal Akuntansi Manado, 3(3), 414-424. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3194>
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Scott, W. R. (2022). *Financial Accounting Theory* (9th ed.). Pearson.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). *Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards*. *The Accounting Review*, 53(1), 112-134.

- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*. *The Accounting Review*.
- Yolina, M. A., Restuningdiah, N., & Than, D. T. K. (2026). *Evaluasi Kepatuhan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Entitas terhadap PSAK 16 PT. FM*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 106–112. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v5i2.7601>
- Yuliana, Y., Zubaida, A., & Harahap, M. N. B. (2025). *Masalah Pengakuan dan Pengukuran PSAK No. 16 pada Aset Tetap*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 2(3). <https://doi.org/10.70248/jakpt.v2i3.1597>